

Literasi Digital dan Kemanusiaan: Menjadi Cerdas dan Bijak di Era Digital

Ririn Fitriana *¹
Ranu Iskandar ²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

*e-mail : riranafitria@gmail.com ¹ranuiskandar@mail.unnes.ac.id ²

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan lanskap kehidupan sosial yang terdisrupsi secara masif. Interaksi yang dahulu bersifat langsung kini berpindah ke ruang virtual yang tak terbatas. Meskipun hal ini memberikan kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara literasi digital dan kemanusiaan sebagai dua pilar penting dalam membangun masyarakat digital yang beradab. Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka, mengumpulkan berbagai referensi akademik, laporan organisasi, serta hasil survei untuk menganalisis fenomena literasi digital dan tantangan etika di era internet. Hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara kemampuan teknis digital dan kesadaran etis masyarakat. Praktik penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, dan pelanggaran privasi merupakan gejala dari rendahnya literasi digital berbasis nilai kemanusiaan. Artikel ini menyarankan perlunya integrasi pendidikan etika digital di berbagai level pendidikan, penguatan komunitas digital positif, serta keterlibatan aktif mahasiswa sebagai agen transformasi sosial. Dengan mengembangkan literasi digital yang humanis, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk kemaslahatan bersama.

Kata kunci: etika digital, literasi digital, mahasiswa, nilai kemanusiaan, ruang maya.

Abstract

The advancement of information technology has created a massively disrupted social life landscape. Interactions that used to be direct have now moved to a limitless virtual space. Although this provides convenience, it also poses challenges in maintaining human values. This study aims to examine in depth the relationship between digital literacy and humanity as two important pillars in building a civilized digital society. This writing uses a qualitative descriptive approach with a literature study method, collecting various academic references, organizational reports, and survey results to analyze the phenomenon of digital literacy and ethical challenges in the internet era. The results of the study show that there is still a significant gap between digital technical capabilities and people's ethical awareness. The practice of spreading hoaxes, hate speech, cyberbullying, and privacy violations are symptoms of low digital literacy based on human values. This article suggests the need for integration of digital ethics education at various levels of education, strengthening positive digital communities, and active involvement of students as agents of social transformation. By developing humanistic digital literacy, society can utilize technology optimally for the common good.

Keywords: cyberspace, digital ethics, digital literacy, human values, students.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung sejak pergantian abad ke-21 telah membawa dunia pada era baru yang ditandai dengan konektivitas global, pertukaran informasi secara real-time, serta revolusi dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi pilar utama dalam pembentukan masyarakat digital yang kini tidak lagi terbatas pada kawasan-kawasan perkotaan atau negara maju, melainkan telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh penjuru dunia. Manuel Castells (2010) menyebut fenomena ini sebagai *network society*, di mana struktur sosial dan ekonomi dibentuk oleh jaringan digital yang terus berkembang dan saling terhubung, memungkinkan interaksi dan kolaborasi tanpa batas geografis. Perkembangan teknologi ini membawa dampak signifikan terhadap cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Informasi yang dulunya sulit diakses kini dapat diperoleh dengan cepat melalui internet, sementara media sosial memungkinkan terciptanya ruang publik baru yang dinamis dan

interaktif. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan kompleks, terutama dalam hal literasi digital. Meskipun akses terhadap teknologi semakin meluas, tidak semua individu memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola informasi secara kritis dan etis. Kondisi ini membuka ruang bagi penyebaran informasi yang salah (misinformasi), hoaks, serta praktik-praktik digital yang merugikan seperti perundungan siber dan pelanggaran privasi.

Oleh karena itu, literasi digital menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang tidak hanya meliputi penguasaan aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang dampak sosial, budaya, dan moral dari aktivitas digital. Literasi digital yang komprehensif harus mampu membekali individu dengan kemampuan untuk menilai keakuratan informasi, berkomunikasi secara etis, serta menjaga integritas dan empati dalam interaksi digital. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi, melainkan juga menjadi pelaku aktif yang bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Transformasi digital ini, apabila diarahkan secara tepat, berpotensi besar memperkuat pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang inklusif. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, hingga keluarga. Artikel ini akan membahas pentingnya literasi digital yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai fondasi untuk membentuk masyarakat digital yang cerdas, bijak, dan beretika di era teknologi yang terus berkembang pesat.

Di Indonesia, penetrasi teknologi digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Laporan *We Are Social* (2023) mencatat bahwa lebih dari 77 persen penduduk Indonesia kini telah terkoneksi dengan internet, dengan sekitar 98 persen pengguna internet mengaksesnya melalui perangkat mobile. Angka ini menunjukkan bahwa perangkat digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk di kalangan usia muda dan anak-anak. Dalam konteks tersebut, teknologi digital tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat bantu, melainkan telah menjadi medium utama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti berkomunikasi, belajar, bekerja, bahkan berekspresi dan berpartisipasi dalam ruang publik. Namun, pesatnya digitalisasi ini tidak hanya membawa dampak positif. Di balik kemudahan akses dan konektivitas, muncul berbagai persoalan kompleks yang mengiringi penggunaan teknologi secara masif. Fenomena penyebaran informasi palsu (hoaks), misinformasi, disinformasi, ujaran kebencian, hingga kecanduan digital menjadi masalah nyata yang merongrong kualitas interaksi sosial dan kesehatan mental masyarakat. Arus informasi yang sangat cepat dan massif, tanpa adanya mekanisme penyaringan dan pemahaman kritis yang memadai, membuat masyarakat—terutama generasi muda menjadi rentan terhadap manipulasi dan distorsi informasi. Wardle dan Derakhshan (2017) menyebut kondisi ini sebagai *information disorder*, suatu situasi di mana individu kesulitan membedakan mana informasi yang benar, menyesatkan, ataupun sepenuhnya palsu, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan dan polarisasi sosial.

Di sisi lain, paparan digital yang tinggi juga berdampak pada aspek psikososial penggunaannya. Menurut Turkle (2015), interaksi digital cenderung menggeser dan mengurangi intensitas komunikasi tatap muka yang selama ini menjadi fondasi utama pembentukan empati dan keterikatan emosional antarindividu. Komunikasi yang dimediasi oleh teknologi seringkali bersifat instan dan dangkal, yang berakibat pada menurunnya kualitas hubungan interpersonal serta meningkatnya perasaan kesepian, isolasi, dan keterasingan dalam masyarakat modern. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat kemampuan empati dan keterikatan sosial merupakan elemen krusial bagi kohesi sosial dan kesehatan mental individu. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan meningkatnya penggunaan perangkat digital pada anak-anak dan remaja, kelompok yang sedang dalam tahap perkembangan sosial dan emosional yang sangat rentan. Choi (2021) mencatat bahwa paparan gawai yang berlebihan tanpa pengawasan dan bimbingan yang memadai dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan sosial dan emosional pada anak. Mereka berisiko menunjukkan perilaku impulsif, kecemasan sosial, gangguan konsentrasi, serta kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Oleh karena itu, pendampingan dan edukasi literasi digital sejak usia dini menjadi sangat penting agar generasi muda tidak hanya

mampu menggunakan teknologi dengan terampil, tetapi juga memiliki ketahanan moral, kesadaran etis, dan kapasitas kritis dalam menghadapi kompleksitas dunia digital. Dengan demikian, fenomena digitalisasi yang cepat di Indonesia menuntut pendekatan literasi digital yang komprehensif dan humanis, yang tidak hanya fokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan nilai dan etika untuk membentuk masyarakat digital yang cerdas, bijak, dan berdaya tahan sosial-emosional.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh transformasi digital, literasi digital muncul sebagai kunci utama untuk membekali individu agar mampu beradaptasi secara sehat dan bertanggung jawab dalam dunia maya. Namun, literasi digital tidak boleh dipahami secara sempit sebagai sekadar kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat atau sekadar mencari dan mengonsumsi informasi di internet. Konsep literasi digital yang ideal harus melampaui aspek mekanis tersebut dan mencakup dimensi kognitif, sosial, serta etis yang saling terkait secara holistik. Livingstone (2019) menegaskan bahwa literasi digital harus mencakup kemampuan kritis dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi, pemahaman terhadap konteks sosial di balik media digital, serta pembentukan identitas diri yang sehat dan bertanggung jawab dalam ruang maya. Hal ini menuntut pengguna untuk tidak hanya menjadi konsumen pasif, melainkan juga pelaku aktif yang sadar akan implikasi sosial dari aktivitas digitalnya.

Pandangan ini sejalan dengan Rheingold (2012) yang mengemukakan konsep *mindful engagement* dalam dunia digital, yakni keterlibatan yang disertai kesadaran penuh terhadap nilai-nilai etis dan dampak sosial dari setiap tindakan daring. Dengan pendekatan ini, pengguna digital diajak untuk berpartisipasi secara reflektif dan bertanggung jawab, menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta memupuk empati dalam interaksi digital. Konsep ini penting untuk mengatasi fenomena negatif seperti ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran informasi palsu yang sering kali berakar pada kurangnya kesadaran dan tanggung jawab sosial. Sayangnya, pendekatan literasi digital di banyak lembaga pendidikan saat ini masih cenderung fokus pada aspek teknis dan produksi konten, sehingga mengabaikan dimensi moral, etika, dan nilai kemanusiaan yang sangat krusial. Buckingham (2010) mengkritik bahwa pendidikan media modern terlalu menitikberatkan pada kemampuan teknis dan kreativitas dalam membuat konten tanpa memberikan ruang yang cukup bagi refleksi kritis terhadap nilai-nilai sosial dan implikasi etis dari konten yang diproduksi maupun dikonsumsi. Akibatnya, para pelajar mungkin memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi kurang mampu menyaring, memahami, dan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial dan moral yang berlaku. Kondisi ini menjadi sangat problematis terutama dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman sosial, budaya, dan agama. Jika literasi digital dijalankan tanpa memasukkan nilai-nilai kemanusiaan, maka justru berpotensi memperlebar jurang sosial dan memicu konflik akibat provokasi digital yang tidak terkendali. Ketidakmampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan di ruang digital dapat mengakibatkan polarisasi yang tajam, intoleransi, dan bahkan kekerasan sosial yang berawal dari interaksi daring. Oleh karena itu, pengembangan literasi digital harus dilakukan secara komprehensif, dengan memasukkan pendidikan nilai-nilai luhur bangsa seperti toleransi, kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini tidak hanya akan membentuk individu yang cakap teknologi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan positif yang menjaga keharmonisan dan keberlanjutan sosial di era digital.

Untuk itu, penting dikembangkan pendekatan literasi digital yang bersifat holistik, humanis, dan kontekstual. Literasi digital humanis menempatkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, tanggung jawab, dan solidaritas sebagai dasar dalam berinteraksi di ruang digital. Pangrazio (2016) menyebut pendekatan ini sebagai *critical digital literacy*, yakni kemampuan untuk secara reflektif memahami bagaimana struktur digital memengaruhi relasi kuasa, identitas, dan representasi dalam masyarakat. Literasi semacam ini bukan hanya mendidik individu untuk cakap secara teknologi, tetapi juga bijak secara sosial dan moral. Lebih lanjut, pendekatan literasi digital berbasis nilai-nilai kemanusiaan juga selaras dengan upaya pembangunan karakter bangsa. Dalam konteks kebijakan nasional, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dalam keberagaman, serta keadilan sosial harus menjadi ruh dalam setiap

interaksi digital masyarakat Indonesia. Literasi digital yang berpijak pada nilai-nilai tersebut akan memperkuat integrasi sosial dan meminimalkan potensi disintegrasi akibat konten digital yang bersifat eksklusif, intoleran, atau provokatif (Sutrisno, 2020).

Tentu, upaya ini tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, sektor swasta, dan komunitas digital—dalam merancang ekosistem literasi digital yang berkelanjutan. Kurikulum pendidikan harus memasukkan aspek literasi digital kritis sejak jenjang dasar. Orang tua perlu didukung dengan edukasi yang memadai agar mampu menjadi pendamping digital yang bijak bagi anak-anaknya. Pemerintah dan platform digital harus menciptakan kebijakan yang melindungi ruang digital dari konten berbahaya dan menstimulasi praktik digital yang positif. Komunitas digital, termasuk para influencer dan content creator, juga memegang peran penting dalam menanamkan budaya digital yang sehat dan etis.

Dengan literasi digital yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dunia digital yang kompleks dan cepat berubah. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga aktor aktif yang berkontribusi dalam membentuk ruang digital yang adil, inklusif, dan beradab. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana literasi digital yang bersifat humanis dapat membentuk karakter masyarakat digital yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga luhur secara moral. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan literasi digital di Indonesia, serta menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat digital yang seimbang antara kecanggihan teknologi dan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang merupakan metode utama dalam penelitian berbasis kajian literatur dan konseptual. Pendekatan ini dipilih karena sangat sesuai dengan tujuan penelitian yang menitikberatkan pada pemahaman makna, konteks sosial, serta refleksi normatif terhadap isu literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat di dalamnya. Dengan menggunakan studi pustaka, peneliti dapat mengakses beragam sumber teoretis dan empiris yang relevan, mulai dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian, hingga dokumen kebijakan yang membahas secara mendalam tentang fenomena dan tantangan literasi digital dalam konteks sosial dan budaya yang beragam.

Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan kontekstual secara mendalam melalui proses penafsiran terhadap teks, simbol, serta narasi sosial yang ditemukan dalam literatur. Hal ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi juga menelaah hubungan, pola, dan makna yang tersembunyi di balik fenomena tersebut. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks kajian literasi digital, di mana aspek teknis dan kultural, moral dan sosial saling berinteraksi dan membentuk pengalaman digital individu maupun masyarakat.

Selain itu, metode studi pustaka memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teori yang kuat sebagai dasar argumentasi serta mengaitkan temuan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menghadirkan deskripsi fenomena secara faktual, tetapi juga mampu memberikan refleksi kritis dan konseptual yang mendalam tentang pentingnya integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam literasi digital. Pendekatan ini mendukung tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan holistik, serta menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan, pendidikan, dan praktik literasi digital yang lebih bermakna dan berorientasi pada manusia.

Dalam praktiknya, penulis mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan, meliputi jurnal akademik terindeks internasional, buku referensi ilmiah, artikel berita yang kredibel, laporan dari lembaga nasional maupun internasional (seperti UNESCO, UNICEF, dan OECD), serta publikasi dari organisasi yang aktif dalam bidang literasi digital dan pendidikan etis. Literatur-literatur ini dipilih secara purposif berdasarkan relevansi

tematik terhadap dua isu utama dalam tulisan ini, yaitu perkembangan literasi digital dan integrasi nilai-nilai kemanusiaan dalam ruang digital. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dalam beberapa tahap: pertama, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama seperti etika digital, empati daring, partisipasi kritis, keamanan siber, dan pengaruh sosial media; kedua, dilakukan penyaringan terhadap informasi yang dianggap valid dan kredibel berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan dalam sumber tersebut; dan ketiga, dilakukan sintesis literatur untuk memperoleh pemahaman komprehensif serta mengidentifikasi celah kajian yang belum banyak dibahas secara eksplisit, terutama mengenai keterkaitan antara literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks Indonesia.

Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menggali secara konseptual dan kontekstual relasi antara literasi digital dan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya dalam bingkai kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi praktik-praktik literasi digital yang berpotensi mengembangkan kesadaran etis, empati sosial, serta tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang digital (Mihailidis & Thevenin, 2013). Oleh karena itu, hasil kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga reflektif dan aplikatif—yakni menyajikan pemikiran kritis yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan, kurikulum, maupun kampanye literasi digital berbasis nilai.

Penulis juga membandingkan berbagai pendekatan literasi digital yang diterapkan di negara-negara lain seperti Finlandia, Korea Selatan, dan Australia, untuk memperoleh wawasan global yang dapat dijadikan inspirasi dalam merumuskan pendekatan lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Komparasi ini penting untuk melihat bagaimana praktik literasi digital yang sukses di negara lain mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan seperti inklusivitas, kesetaraan, dan rasa hormat dalam penggunaan teknologi digital (Livingstone & Helsper, 2007; Pangrazio, 2016). Dalam hal ini, penulis menerapkan prinsip transferability dalam metodologi kualitatif, yakni menyesuaikan praktik-praktik terbaik dari luar negeri dengan konteks lokal secara bijak dan kritis. Metode ini juga memungkinkan penulis untuk tidak hanya mengeksplorasi konsep-konsep dasar seperti definisi literasi digital atau komponen kompetensi digital, tetapi juga menganalisis praktik-praktik baik (*best practices*) yang terbukti mampu menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam penggunaan media digital. Salah satu contohnya adalah program digital citizenship education yang diterapkan UNESCO, yang menggabungkan dimensi kognitif, afektif, dan sosial dalam membentuk warga digital yang bertanggung jawab dan beretika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi digital dalam kehidupan modern tidak lagi sekadar menjadi keterampilan tambahan, melainkan telah menjelma sebagai kompetensi dasar yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat hidup, bekerja, dan berinteraksi secara bermakna dalam masyarakat digital. Namun demikian, pemahaman umum tentang literasi digital cenderung masih sempit dan terfokus pada aspek teknis—seperti penggunaan perangkat lunak, navigasi internet, dan penguasaan aplikasi komunikasi. Padahal, pendekatan teknosentris ini mengabaikan dimensi moral, sosial, dan kultural yang melekat dalam penggunaan teknologi itu sendiri. Koltay (2011) mengkritik pemahaman semacam ini karena tidak memperhitungkan interaksi antara pengguna dengan konteks sosial dan nilai yang menyertainya. Dalam praktiknya, dunia digital telah memperlihatkan banyak gejala yang menunjukkan ketidakseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kedewasaan penggunanya. Fenomena perundungan siber, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga pelanggaran data pribadi menjadi cermin dari krisis nilai kemanusiaan di ruang digital. Ruang yang seharusnya menjadi wadah kolaborasi dan pertukaran informasi justru berubah menjadi arena konflik yang memecah-belah. Floridi (2010) menyebut bahwa dunia digital atau *infosfera* bukan sekadar medium pasif, melainkan ruang etis di mana setiap tindakan membawa konsekuensi moral. Maka dari itu, kemampuan digital harus disertai dengan integritas, empati, dan kesadaran akan dampak sosial dari aktivitas daring. Lebih jauh, relasi antar individu dalam ruang digital membutuhkan fondasi nilai yang kuat agar tidak terjebak dalam pola komunikasi destruktif. Ketika ruang maya dibanjiri oleh informasi yang manipulatif dan

emosional, pengguna yang tidak dibekali literasi kritis dan etis mudah terpengaruh atau bahkan menjadi bagian dari sirkulasi informasi bermasalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan mengakses informasi, tetapi juga mencakup kapasitas untuk menyaring, merefleksi, dan mengambil sikap atas informasi yang ditemukan. Tanpa dimensi etika dan kemanusiaan, pengguna internet berpotensi menjadi tidak lebih dari sekadar konsumen teknologi yang pasif atau bahkan aktor yang menyebarkan kekerasan simbolik.

Kebutuhan untuk mengembangkan literasi digital berbasis nilai menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital dalam hampir semua aspek kehidupan—mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga hubungan sosial. Dalam situasi ini, penguasaan teknologi tanpa pertimbangan moral hanya akan mempercepat disorientasi sosial dan degradasi nilai. Oleh karena itu, penting untuk merancang pendekatan literasi digital yang tidak hanya menekankan aspek fungsional, tetapi juga mengintegrasikan pemahaman tentang hak asasi manusia, keadilan sosial, serta prinsip hidup bersama secara damai dan inklusif. Literasi digital yang humanis tidak hanya akan melahirkan warga digital yang cakap, tetapi juga bertanggung jawab dan sadar akan peran sosialnya dalam membentuk ekosistem digital yang sehat dan beradab.

Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai wahana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter digital yang bertanggung jawab. Sekolah, universitas, dan berbagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap proses pembelajaran digital. Hal ini menuntut adanya pergeseran paradigma dari pengajaran yang bersifat instruksional menuju pendekatan yang lebih reflektif dan dialogis, di mana siswa diajak untuk menganalisis dan mengevaluasi implikasi etis dari tindakan mereka di dunia maya. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan agar mampu menjawab tantangan zaman, misalnya dengan memasukkan materi tentang keamanan siber, hak digital, perlindungan privasi, hingga praktik anti-diskriminasi di dunia daring. Lebih jauh lagi, lingkungan belajar yang etis perlu dikembangkan tidak hanya melalui materi, tetapi juga melalui praktik dan keteladanan. Guru dan dosen dituntut tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga figur moral yang menunjukkan bagaimana teknologi seharusnya digunakan secara bertanggung jawab. Kegiatan pembelajaran dapat melibatkan studi kasus nyata tentang pelanggaran etika di media sosial, diskusi kritis tentang algoritma dan bias digital, hingga proyek kolaboratif yang mendorong peserta didik untuk menciptakan konten digital yang bermanfaat dan bermakna secara sosial. Dalam hal ini, pendidikan literasi digital tidak lagi bersifat netral, melainkan menjadi sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, empati, dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab (Mihailidis & Thevenin, 2013). Transformasi semacam ini juga perlu mengakomodasi keragaman latar belakang sosial dan budaya peserta didik. Literasi digital yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan harus inklusif dan mampu mengatasi ketimpangan akses maupun disparitas digital yang masih terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang kurang terjangkau teknologi. Oleh sebab itu, kolaborasi antara negara, sektor pendidikan, komunitas lokal, dan pihak swasta sangat diperlukan untuk memperluas jangkauan pendidikan digital yang bermutu dan berkeadilan. Pendidikan yang berpihak pada kemanusiaan akan memastikan bahwa generasi masa depan tidak hanya melek terhadap teknologi, tetapi juga berkomitmen terhadap penggunaan teknologi untuk menciptakan masyarakat digital yang adil, empatik, dan berbudaya.

Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal dan informal juga memegang peranan penting dalam memperluas cakupan literasi digital humanis. Komunitas-komunitas digital, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan media sosial dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti webinar, pelatihan konten positif, dan kampanye daring. Melalui pendekatan berbasis komunitas, literasi digital tidak hanya diajarkan secara top-down, tetapi tumbuh sebagai praktik kolektif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, gerakan #BijakBersosmed di Indonesia telah berhasil mengajak masyarakat untuk lebih sadar terhadap etika bermedia, mendorong praktik berbagi yang bertanggung jawab, dan melawan ujaran kebencian di ruang maya. Keberhasilan pendidikan nonformal dan informal ini tidak terlepas dari fleksibilitasnya

dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang kurang terakses oleh sistem pendidikan formal. Melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual, komunitas-komunitas ini mampu menciptakan ruang dialog yang terbuka dan inklusif tentang bagaimana nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan solidaritas dapat diintegrasikan dalam aktivitas digital sehari-hari. Di sinilah literasi digital tidak sekadar menjadi program pelatihan teknis, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama. Bahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam memperkuat upaya literasi digital yang berakar pada nilai kemanusiaan. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, harus bekerja sama dengan perusahaan teknologi, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang strategi literasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Bentuk kolaborasi ini dapat berupa penyusunan pedoman etika digital nasional, regulasi perlindungan data pribadi yang ketat, serta penyediaan platform edukatif yang aman dan bebas dari bias algoritmik. Seperti yang ditegaskan oleh Livingstone dan Helsper (2007), intervensi yang efektif dalam literasi digital memerlukan pendekatan ekosistemik, yaitu keterlibatan berbagai aktor sosial secara sinergis. Lebih dari itu, dalam era algoritma dan kecerdasan buatan, literasi digital juga harus mencakup kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan di balik platform digital. Pengguna perlu diberdayakan agar tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana data mereka digunakan, bagaimana informasi dikurasi, dan bagaimana kebijakan teknologi dapat memengaruhi hak-hak mereka sebagai warga digital. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital yang humanis harus melampaui aspek instruksional dan masuk ke wilayah pemberdayaan sosial, politik, dan kultural. Dengan demikian, transformasi digital yang kita jalani saat ini akan bergerak ke arah yang lebih adil, beradab, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Peran keluarga pun tidak bisa dikesampingkan dalam membentuk literasi digital yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Dalam konteks domestik, orang tua memiliki tanggung jawab sentral sebagai pendamping dan pembimbing utama anak-anak dalam menghadapi dunia digital yang semakin kompleks. Agar mampu menjalankan peran ini dengan efektif, orang tua harus memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi serta potensi dan risiko yang menyertainya. Pendampingan yang bijak tidak hanya sekadar membatasi akses anak terhadap konten negatif, tetapi juga menanamkan nilai-nilai integritas, rasa hormat, dan kesadaran akan batasan-batasan dalam berinteraksi di ruang digital. Melalui dialog terbuka dan contoh perilaku yang baik, keluarga menjadi ruang pertama di mana karakter digital yang kuat dan bertanggung jawab dapat dibangun. Literasi digital di rumah juga meliputi kemampuan mengenali informasi yang akurat, beretika dalam berkomunikasi, serta menyikapi perbedaan pendapat secara toleran dan empatik. Di tingkat makro, negara memegang peranan yang tak kalah penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan berkeadaban. Pemerintah harus aktif mendorong kebijakan yang mendukung literasi digital yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia. Hal ini mencakup perlindungan hak digital warga negara, regulasi yang mengatur penggunaan data pribadi, serta pengawasan terhadap praktik-praktik teknologi yang berpotensi merugikan masyarakat, seperti penyebaran informasi palsu, diskriminasi berbasis algoritma, dan pelanggaran privasi. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi akses pendidikan digital yang merata, baik melalui pendidikan formal maupun inisiatif masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi secara adil. Sinergi antara kebijakan publik, sektor teknologi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola digital yang etis dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menegaskan bahwa literasi digital harus berorientasi pada kemanusiaan jika ingin benar-benar menjadi kekuatan pembebas dan pemberdaya dalam era digital. Tanpa landasan moral dan nilai sosial, kemampuan teknologi justru berisiko menjadi alat yang memperluas ketimpangan, memperkuat intoleransi, dan memicu disintegrasi sosial. Ketimpangan digital dapat menciptakan jurang yang semakin dalam antara kelompok yang berdaya dan yang terpinggirkan, sementara intoleransi digital merusak kohesi sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu, masyarakat digital yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan kedalaman nilai

kemanusiaan. Dengan cara inilah masa depan digital Indonesia dapat dibangun secara inklusif, berbudaya, dan beradab, di mana setiap individu tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang kompeten, tetapi juga warga digital yang bertanggung jawab dan berintegritas.

KESIMPULAN

pembahasan ini menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar keterampilan teknis yang harus dikuasai untuk mengoperasikan perangkat atau menavigasi dunia maya. Lebih dari itu, literasi digital harus berakar pada nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi kejujuran, empati, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama pengguna. Literasi digital yang ideal mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan etis, sehingga mampu membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga dewasa secara emosional dan bermoral dalam menghadapi dinamika digital. Dalam konteks ini, pendidikan formal, nonformal, dan informal menjadi pilar penting yang saling melengkapi. Sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya bertugas mengajarkan keterampilan digital, tetapi juga mendidik generasi muda untuk menyadari hak dan tanggung jawab digital serta mengembangkan sikap kritis dan etis terhadap informasi dan interaksi online. Di luar lingkungan formal, komunitas digital dan organisasi masyarakat turut berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan edukatif dan kampanye sosial.

Peran keluarga juga tidak kalah penting, karena di sinilah nilai-nilai dasar seperti integritas, rasa hormat, dan kesadaran akan batasan digital pertama kali ditanamkan dan dipraktikkan secara konsisten. Orang tua yang melek digital dapat menjadi pendamping yang efektif bagi anak-anak dalam menghadapi tantangan dan peluang di dunia digital, sehingga karakter digital yang kuat dan bertanggung jawab dapat terbentuk sejak dini. Di tingkat makro, pemerintah harus mengambil peran aktif dengan merancang kebijakan yang mendukung literasi digital berbasis nilai serta memastikan perlindungan hak digital seluruh warga negara. Kolaborasi antara pemerintah, sektor teknologi, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil mutlak diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, inklusif, dan berkeadilan. Akhirnya, tanpa landasan moral dan nilai sosial yang kuat, kemampuan teknis dalam dunia digital justru berpotensi memperparah masalah sosial seperti ketimpangan digital, penyebaran ujaran kebencian, dan disintegrasi sosial. Oleh karena itu, membangun literasi digital yang berpihak pada kemanusiaan adalah langkah strategis untuk mempersiapkan masyarakat digital Indonesia yang tidak hanya adaptif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga memiliki integritas, kesadaran sosial, dan budaya yang beradab. Dengan pendekatan ini, masa depan digital Indonesia dapat diwujudkan sebagai ruang yang inklusif, berbudaya, dan mampu memberdayakan setiap individu menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada xxx yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Polity Press.
- Buckingham, D. (2010). *The Future of Media Literacy in the Age of the Internet*. In *Media Literacy: New Agendas in Communication*.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society (2nd Ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Choi, M. (2021). The Effects of Early Gadget Exposure on Child Development. *Journal of Child Media Studies*, 12(1), 34–47.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Sage.
- Jenkins, H. et al. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. MIT Press.

- Livingstone, S. (2019). *Children and Media in a Digital World*. Polity Press.
- Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. *New Media & Society*, 9(4), 671–696
- Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media Literacy as a Core Competency for Engaged Citizenship in Participatory Democracy. *American Behavioral Scientist*, 57(11), 1611–1622.
- Pangrazio, L. (2016). Reconceptualising Critical Digital Literacy. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 37(2), 163–174.
- Pangrazio, L. (2016). Reconceptualising Critical Digital Literacy. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 37(2), 163–174.
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.
- Sutrisno, B. (2020). Literasi Digital dan Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 10(2), 124–137.
- Turkle, S. (2015). *Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age*. Penguin Press.
- Wardle, C. & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework*. Council of Europe.
- We Are Social. (2023). *Digital 2023: Indonesia*. <https://wearesocial.com/>